Antropologi (tentang) Pembangunan: Peluang Terapan dan Tantangannya

Hestu Prahara, PhD
(disiapkan untuk Koentjaraningrat Memorial Lectures 2025)

Muqodimah

Selamat pagi bapak-ibu, rekan-rekan, serta para hadirin, yang untuk mempersingkat waktu tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya.

Para hadirin yang budiman, membaca tema KML tahun ini, saya teringat dengan buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Professor Hans Pols yang berjudul *Nurturing Indonesia.* Dalam buku tersebut, diceritakan para dokter bumi putera lulusan STOVIA (sekolah kedokteran khusus untuk kaum bumi putra) berjalan kaki dari kampung ke kampung membawa obat-obatan sederhana (kinine, minyak kayu putih, dan perban) dalam tas kulit mereka untuk merawat penderita malaria, TBC, infeksi kulit, dan lain-lain. Namun yang mereka bawa sesungguhnya lebih besar dari isi dalam tas kulit mereka, mereka mengemban sebuah visi: bahwa merawat tubuh adalah jalan menuju kemajuan dan masa depan. Dalam kisah tersebut, keperawatan bukan semata tindakan medis; ia adalah praktik politik tentang kemungkinan sebuah bangsa yang baru, sebuah bangsa yang dapat keluar dari keadaan sakit yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan pengabaian.

Namun, perlu juga dicatat, bahwa para Dokter Jawa (demikian mereka disebut pada abad ke 20) tidak sekedar "menerapkan teori medis" yang mereka pelajari di STOVIA. Mereka sedang menjawab kemendesakan kolonial: wabah malaria, TBC, infeksi kulit, kekurangan gizi—penyakit yang dialami penduduk tetapi diabaikan oleh pemerintah kolonial kecuali ketika mengancam stabilitas ekonomi dan politik. Pols menunjukkan bawa ilmu kedokteran di Indonesia—cara memahami tubuh, sakit, dan perawatan—tidak muncul dari ruang abstraksi. Ia muncul dalam konteks sosial-politik yang genting yang menuntut sebuah praksis intervensi.

Beberapa dekade kemudian, bapak antropologi Indonesia, Prof. Koentjaraningrat menulis kebudayaan, mentalitet, dan pembangunan. Saat saya membaca kembali buku tersebut, saya merasakan energi yang mirip dengan para dokter STOVIA meski konteksnya berbeda: Indonesia sudah merdeka, tetapi menghadapi masalah baru: ketertinggalan ekonomi, tingginya angka buta huruf, yang melahirkan keinginan untuk membentuk "manusia pembangunan."

Dalam hal ini, Koentjaraningrat tidak sekedar membuat teori "demi teori." Ia menjawab kemendesakan politik pasca-kolonial: bagaimana membayangkan bangsa yang modern, bekerja keras, tertib, dan rasional.

Sebagai argumen pembuka ceramah saya pagi ini, saya ingin menegaskan bahwa sebagaimana disiplin ilmu kedokteran yang digambarkan Hans Pols, antropologi di Indonesia tidak pernah lahir sebagai disiplin netral atau berkembang dalam ruang kosong. Ia tumbuh dalam kemendesakan politik pasca-kolonial: kebutuhan membayangkan bangsa yang modern, memetakan "mentalitet," dan merancang perubahan sosial. Dalam konteks inilah, seperti yang dikemukakan Koentjaraningrat, antropologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyek pembangunan—membantu negara membaca "mentalitet" rakyatnya, menjelaskan proses perubahan, sekaligus merumuskan perangkat intervensi yang dianggap perlu.

Dari sini saya sampai pada argumen kedua: sejak awal kemunculannya—bukan hanya di Indonesia, tetapi di banyak konteks global—antropologi memang bersifat terapan. Konsep dan teori antropologi tidak pernah lahir dari abstraksi yang melayang di atas kehidupan, melainkan dari keharusan menjawab situasi-situasi pragmatis: kolonialisme, pembangunan, transformasi desa, perubahan agraria, kesehatan masyarakat, dan berbagai bentuk ketidaksetaraan yang memerlukan penjelasan. Karena itu, membedakan "antropologi terapan" dari "antropologi teoritik" sering kali justru menutupi kenyataan bahwa seluruh teori antropologi adalah hasil keterlibatan mendalam dengan persoalan hidup yang konkret.

Pertanyaannya bagi kita sekarang bukan apakah antropologi bersifat terapan atau tidak, tetapi: bagaimana kita memahami praktik antropologi dalam konteks kemendesakan baru hari ini?

Membentuk komunitas, merawat tubuh

Para hadirin yang budiman,
Ketika kita menyebut kata *komunitas*, kita sering membayangkan sesuatu yang sudah ada: sekumpulan warga yang hidup berdampingan, saling mengenal, saling membantu. Namun dalam sejarah pembangunan di Indonesia, komunitas bukanlah sesuatu yang natural. Komunitas adalah sesuatu yang dibentuk, didefinisikan, lalu diintervensi.

Saya ingin membawa kita sejenak ke akhir tahun 1990-an, ketika Indonesia dihantam krisis multidimensi. Dalam situasi ketidakpastian itu muncul sebuah program bernama Kecamatan Development Program, yang kelak kita kenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat. Program ini sering dipuji sebagai upaya demokratisasi dari bawah: musyawarah desa diperkuat, partisipasi warga didorong, dan alokasi dana diarahkan langsung ke desa.

Tetapi menurut saya, KDP (dan kelak PNPM lalu P3MD) melakukan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Program ini mendefinisikan apa itu komunitas: siapa yang dianggap warga yang sah, siapa yang mewakili suara desa, dan bagaimana aspirasi harus disampaikan melalui proposal dan musyawarah. Komunitas menjadi *terbaca*, *terukur*, dan *siap diorganisir* melalui indikator, *survey baseline*, penilaian modal sosial, hingga *ranking* kemiskinan.

Di titik inilah istilah modal sosial menjadi bahasa baru dalam pembangunan. Ia tidak hanya dipakai untuk menjelaskan efektivitas program, tetapi menjadi norma penilaian: sebuah komunitas dianggap kuat atau lemah, partisipatif atau tidak, layak atau kurang layak menerima bantuan. Fokus pembangunan bergeser dari infrastruktur ke relasi sosial, dari institusi ke perilaku warga. Komunitas (dalam pengertian teknokratis) tidak lagi sekadar ada; ia harus dihasilkan.

Tubuh

Transformasi ini tidak berhenti pada level hubungan sosial. Ia bergerak lebih dalam: menuju tubuh. Ketika PNPM meluaskan mandatnya, perempuan kemudian menjadi pusat dari apa yang disebut *pemberdayaan*: kelompok perempuan, musyawarah perempuan, simpan-pinjam perempuan, dan berbagai kegiatan kesehatan. Perempuan diposisikan sebagai jantung komunitas, sekaligus medium untuk membentuk komunitas ideal yang responsif dan bertanggung jawab.

Di sini, komunitas menjadi ruang produksi subjek, dan tubuh perempuan menjadi lokus intervensi. Melalui audit kegiatan, pelatihan gizi, pencatatan berat badan, hingga kelas parenting, negara membentuk imajinasi baru tentang *ibu yang baik*, *warga yang peduli*, dan *perempuan yang disiplin*. Program komunitas berubah menjadi program *perawatan tubuh*, bukan hanya tubuh mereka sendiri, tetapi tubuh anak, tubuh keluarga, dan tubuh komunitas.

Maka, "membangun komunitas" secara perlahan menjelma menjadi "mengatur cara-cara merawat tubuh." Tubuh perempuan menjadi pintu masuk bagi agenda-agenda pembangunan yang lebih luas: dari pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga, pada hari ini, penanganan stunting.

Dari sinilah saya melihat garis lurus menuju penelitian saya tentang politik perawatan, volunteerism, dan beban kerja kader perempuan dalam intervensi stunting. Pola yang dulu kita temui dalam KDP dan PNPM (tentang bagaimana komunitas diproduksi) kita lihat kembali hari ini pada bagaimana tubuh perempuan menjadi situs utama keberhasilan program. Keberhasilan stunting, misalnya, bergantung pada tindakan harian para ibu, dan terlebih lagi pada kerja senyap para kader yang menjadi perpanjangan tangan negara.

Pada akhirnya, pembangunan komunitas bukan hanya soal membangun ruang sosial. Ia adalah proses membentuk relasi, moralitas, disiplin, dan tubuh. Kita dapat melihat bagaimana sebuah istilah teknokratis seperti *modal sosial* dapat berubah menjadi praktik hidup yang dijalankan oleh perempuan-perempuan di desa: para kader, para ibu, para pengasuh, yang merawat tubuh-tubuh kecil sekaligus menopang tubuh sosial bangsa ini.

Refleksi penutup

Para hadirin yang saya hormati,
Jika ada satu hal yang patut kita waspadai dalam sejarah pembangunan, maka itu adalah kecenderungan untuk membayangkan kemajuan sebagai sesuatu yang tunggal: sebuah jalur lurus yang harus diikuti semua orang, semua komunitas, semua tubuh. Kecenderungan inilah yang sering menjebak pembangunan ke dalam teknokrasi: sebuah keyakinan bahwa satu model, satu indikator, satu prosedur, dapat dipakai untuk memahami seluruh kompleksitas kehidupan.

Di sinilah antropologi menemukan relevansinya. Bukan sebagai disiplin yang berdiri di luar, atau yang hanya mengoreksi ketidaksempurnaan program, tetapi sebagai instrumen untuk mengenali keberagaman: keberagaman pengalaman, keberagaman cara merawat diri dan komunitas, keberagaman aspirasi tentang apa yang dianggap sebagai kehidupan yang baik. Antropologi memberi kita kemampuan untuk melihat bahwa apa yang disebut "kemajuan" selalu dinegosiasikan, selalu dipertarungkan, dan selalu berakar pada konteks sosial, sejarah, dan relasi kekuasaan tertentu.

Dengan menjaga jarak analitis itulah antropologi menjadi terapan dalam arti yang paling mendasar: ia membantu kita membuka kemungkinan-kemungkinan, bukan sekadar

memperbaiki alur kerja yang ada. Ia memberi ruang bagi imajinasi, bagi alternatif yang tidak selalu muat dalam kerangka program, dan bagi cara-cara hidup yang tidak harus tunduk pada satu definisi modernitas. Dalam konteks ini, bekerja bersama (dengan negara, dengan donor, dengan komunitas) bukan berarti menyetujui arah yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan mengajak semua pihak melihat bahwa tidak ada satu jalan menuju masa depan.

Karena itu, tantangan antropologi pembangunan hari ini adalah merawat keberagaman kemungkinan itu. Dan peluangnya adalah membantu kita membayangkan pembangunan yang tidak memaksa kehidupan masuk ke dalam satu bentuk, melainkan membuka ruang bagi kehidupan sebagaimana dijalani oleh banyak orang, dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan aspirasi yang tidak selalu sama.

Terima kasih.